RAHASIA BANK TERKAIT HARTA BERSAMA DALAM BENTUK SIMPANAN UANG DALAM BANK

**Kurnia Astrea Ningrum, Dr. Bambang Winarno,S.H.,S.U, Siti Noer
Endah,S.H.,M.Kn.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono 169 Malang 65145. Telp (0341) 553898, FAX
(0341)566505
Email: Niew.raka@gmail.com

Abstract

This study discusses about why the husband or wife can not check deposit the money in the bank -related property that the above named by one of the parties and what obstacles checking savings by a husband or wife without the consent of either party . This study aims to discover and analyze the reasons for your husband or wife can not check deposit the money in the bank -related property that the above named by one of the parties .

The method used in this research is normative juridical approach to legislation , case approach . Legal materials will be analyzed using qualitative descriptive technique in the form of a table or exposure by comparing the consideration of the judge (verdict) and will be analyzed qualitatively by using textual interpretation .

The study found that a husband or wife can not check deposit money in the bank because of the provisions that banks are required to keep all information about clients and their savings in accordance with article 40 of law No. 10 of 1998 on the banking system and the threat of crime and witnesses administrative , Barriers checking deposits the money in the bank related to the joint property without the consent of the husband or wife is due to their banking regulations regarding bank secrecy .

Key words: bank secrecy, community property

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai mengapa suami atau istri tidak dapat melakukan pengecekan simpanan uang yang ada dalam bank terkait harta bersama yang diatas namakan oleh salah satu pihak dan apa hambatan-hambatan pengecekan simpanan uang oleh suami atau istri tanpa persetujuan salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan serta menganalisis alasan suami atau istri tidak dapat melakukan pengecekan simpanan uang yang ada dalam bank terkait harta bersama yang di atas

namakan oleh salah satu pihak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Bahan hukum akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dalam bentuk tabel atau paparan dengan membandingkan pertimbangan hakim (putusan) dan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran tekstual.

Hasil penelitian menemukan bahwa suami atau istri tidak dapat melakukan pengecekan simpanan uang yang ada di bank karena adanya ketentuan bahwa bank wajib merahasiakan semua keterangan mengenai nasabah dan simpanannya sesuai dengan pasal 40 undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan serta adanya ancaman pidana maupun saksi administratif. Hambatan pengecekan simpanan uang yang ada dalam bank terkait harta bersama tanpa persetujuan dari suami atau istri yaitu karena adanya peraturan Perbankan mengenai kerahasiaan bank.

Kata kunci: rahasia bank, harta bersama

Latar Belakang

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banca* atau *banque* yang artinya tempat penukaran uang. Menurut pendapat G. M. Verryn Stuart didalam bukunya yang berjudul Bank Politik, pengertian dari bank yaitu badan usaha yang bertujuan memberikan kredit baik dengan uang sendiri maupun uang yang dipinjam dari orang lain dan sebagai alat penukaran uang berupa uang kertas dan uang dalam bentuk surat-surat berharga (giral). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun atau menyimpan dan menyalurkan dana dari masyarakat yang berupa simpanan atau dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.¹ Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank merupakan menghimpun dana, menyalurkan dan memberikan dana dan memberikan jasa kepada bank lainnya. Kegiatan pertama bank menghimpun dan menyalurkan dana sedangkan memberikan

¹ Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan Pasal 1*.

jasa bank lainnya merupakan kegiatan pendukung.² Menghimpun dana dari masyarakat dapat berupa simpanan giro, tabungan dan deposito. Biasanya diberikan balas jasa seperti menambah bunga tabungan atau hadiah sebagai rangsangan untuk masyarakat agar masyarakat suka menabung. Kalau menyalurkan dana merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan memberikan jasa perbankan kepada bank lain digunakan untuk mendukung kelancaran suatu kegiatan utama bank.

Kewajiban bank yaitu mengembalikan agunan ketika kredit telah lunas, menjamin kerahasiaan identitas nasabah serta dana yang disimpannya kecuali ketika perundang-undangan menentukan lain, membayar bunga simpanan dalam bank sesuai dengan perjanjian dari nasabah dan memberikan laporan keuangan kepada nasabah terhadap perkembangan dananya dibank.³

Bank sebagai lembaga keuangan yang diberi kepercayaan untuk menyimpan uang dari masyarakat berkewajiban untuk menjaga keterangan mengenai nasabah serta uang yang disimpannya. Hal tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena sebagai lembaga yang menghimpun dan menyimpan dana dari masyarakat tersebut akan terjaga dengan baik apabila semua informasi mengenai nasabah dapat dijaga oleh bank terkait dengan kerahasiannya.

Yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini terkait dengan kewajiban bank sesuai pasal 40 ayat 1 UU Nomor 10 tahun 1998 perbankan yaitu bank harus wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah dalam penyimpanan dan simpanannya kecuali yang terdapat dalam pasal 41 tentang perpajakan, pasal 41A tentang piutang bank, pasal 42 tentang peradilan pidana, pasal 43 tentang pemeriksaan peradilan perdata, pasal 44 tentang tukar menukar informasi antar bank dan pasal 44A tentang pihak lain yang ditunjuk oleh nasabah dan penyelesaian kewarisan,

² Rizka Magfirah, "Arti Bank", <https://id.wikipedia.org/wiki/perbankan>, diakses 6 Juli 2016.

³ Sandi, "Kewajiban Bank", <http://one-widhi.blogspot.co.id/2012/03/kewajiban-bank-dan-nasabah.html>, diakses 6 Juli 2016.

sedangkan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 yaitu :⁴

1. Harta benda yang didapatkan selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing pihak suami dan pihak istri harta benda yang didapat masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang kedua belah pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, istri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi harta bersama baik harta tersebut milik suami atau istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Didalam Undang-undang perbankan terjadi ketidak sesuaian karena dalam undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan istri atau suami memiliki hak yang sama atas harta bersama sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan bank wajib merahasiakan segala keterangan mengenai nasabahnya. Menurut Undang-undang Perbankan dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa baik simpanan suami maupun simpanan istri dalam bank, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai simpanannya tersebut tetapi ada pengecualiannya untuk bank merahasiakan penyimpanan dan simpanan istri maupun suami dalam bank yaitu dijelaskan pasal 41 tentang perbajakan, pasal 41 A tentang piutang, pasal 42 tentang peradilan pidana, pasal 43 tentang pemeriksaan peradilan perdata, pasal 44 tentang tukar menukar informasian antar bank dan pasal 44A tentang pihak lain yang ditunjuk oleh nasabah dan pewarisan.

⁴ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan Pasal 35*.

Dalam hal ini apabila harta bersama antara suami dan istri sebagai contoh si suami atau istri ingin membuka tabungan dibank maka para nasabah tersebut akan mendapatkan satu nomor rekening dimana atas nama salah satu pihak yaitu suami atau istri tersebut. Permasalahan dalam hal ini apabila harta bersama suami atau istri yang ada dalam satu rekening atas nama salah satu pihak dan salah satu pihak tersebut tidak dapat mengakses tabungan yang ada dalam bank seolah-olah menjadi milik pribadi dari salah satu pihak karena adanya ketentuan mengenai rahasia bank. Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan permasalahan apabila salah satu pihak merasa kehilangan haknya untuk mengetahui harta yang dimilikinya pada rekening yang ada dibank, karena sebenarnya harta yang ada di bank tersebut tidak hanya milik salah satu pihak, melainkan milik keduanya yaitu pasangan suami istri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tentang kerahasiaan bank terkait harta gono gini atau harta bersama maka perlu dilakukan kajian tentang rahasia bank terkait harta bersama dalam bentuk simpanan uang dalam bank.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis dalam penelitian ini akan mengkaji dua rumusan masalah, yaitu:

1. Mengapa suami atau istri tidak dapat melakukan pengecekan simpanan uang yang ada dalam bank terkait harta bersama yang diatas namakan oleh salah satu pihak suami atau istri?
2. Apakah hambatan-hambatan pengecekan simpanan oleh suami atau istri tanpa persetujuan salah satu pihak?

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti setiap bahan pustaka ataupun bahan sekunder atau juga penelitian hukum

kepastakaan.⁵ karena penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif, maka permasalahan didalam penelitian ini nantinya akan dikaji berdasarkan sumber hukum kepastakaan dan Undang-Undang. Permasalahan yang akan dikaji secara mendalam mengenai mengapa suami atau istri tidak dapat melakukan pengecekan simpanan uang yang ada dibank terkait harta bersama yang diatasnamakan oleh salah satu pihak.

Didalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan karena didalam penelitian ini penulis akan mengkaji salah satu pasal yang terdapat dalam Undang-Undang khususnya yaitu pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Pendekatan perundang-undangan tersebut berarti pendekatan yang menggunakan legislasi atau regulasi.⁶ Peter Marzuki berpendapat bahwa legislasi dan regulasi merupakan statue, hal ini berdasar dari apa yang telah diterangkan didalamnya dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pembentukan Perundang-Undang yang menyebutkan bahwa:

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), penelitian ini juga didukung dengan pendekatan kasus (*case approach*) ini penulis akan menelaah yang berkaitan dengan kasus rahasia bank terkait harta bersama dalam bentuk simpanan uang di bank dengan pendekatan ini penulis nantinya akan memahami mengenai *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dari hakim dalam memutuskan putusannya yang didalam kasus ini putusan mengenai putusan mengenai izin untuk seorang istri atau suami melakukan pengecekan

⁵ Soejono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 13.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: kencana, 2014), hlm. 137.

simpanan uang terkait harta bersama yang ada dalam bank.⁷

Pembahasan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka hasil yang ditemukan yaitu:

A. Suami atau istri tidak dapat melakukan pengecekan simpanan uang yang ada dalam bank terkait harta bersama yang di atas namakan oleh salah satu pihak suami atau istri

Bank merupakan sesuatu badan atau lembaga keuangan yang menjunjung tinggi kepercayaan dari para nasabah atau masyarakat atas simpanan yang ada dalam bank. Maka, agar kepercayaan tersebut dapat dipercaya oleh masyarakat yang akan menyimpan atau pun yang sudah menyimpan dananya dalam bank. Mengingat bank adalah suatu tempat penyimpanan dana, dan sebagai tempat pembayaran yang mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah bank terhadap bank yaitu mengenai pengurusannya, pengetahuan mengenai perbankan dan kepatuhan terhadap kewajiban bank mengenai rahasia bank.

Bahwa rahasia bank merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal mengenai nasabah bank yang menurut kelazimannya wajib dirahasiakan oleh bank menurut undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Bahwa bank dilarang memberikan keterangan mengenai simpanan uang yang ada dalam bank kecuali dalam pasal 41 tentang perbankan, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44. sementara dalam penjelasan pasal 40 ayat (1) menguraikan mengenai kelaziman yang wajib dirahasiakan oleh bank yaitu dalam seluruh data nasabah maupun informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan nasabah dari seseorang atau badan hukum yang diketahui oleh pihak bank.

⁷ *Ibid.*, hlm. 178.

Berdasarkan pasal 1 angka (28) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.⁸

Berkaitan dengan kerahasiaan bank tersebut maka pihak bank tidak dapat mengizinkan seorang suami atau istri untuk melakukan pengecekan simpanan uang milik pasangannya.

Rahasia bank merupakan hal yang sangat penting karena bank merupakan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan simpanannya. Maka, bank merupakan pihak yang entity dan terafiliasi termasuk pegawai bank maupun manajemen bank yang mengetahui aturan mengenai kerahasiaan bank. Hal tersebut karena untuk menghindari sanksi pidana maupun sanksi administratif dari masyarakat. Melakukan penerapan dalam suatu hal yang berkaitan dengan informasi mengenai rahasia bank sangatlah sulit karena belum ada suatu keseragaman yang menentukan mengenai informasi yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang dirahasiakan oleh bank mengenai informasi atau data seorang nasabah.

Kewajiban bank dapat bersifat eksplisit dan implisit mengenai penyimpanan dan simpanannya di bank. pada umumnya perjanjian yang dilakukan bank dan nasabah merupakan perjanjian yang bersifat eksplisit. Misalnya untuk pembukaan simpanan uang yang ada dalam bank. Dalam hal tersebut perjanjian antara bank dan nasabah memiliki itikat baik didalam perjanjian yang dibuatnya. Perjanjian tersebut secara diam-diam mencantumkan kewajiban mengenai rahasia bank mengenai penyimpanan dan simpanannya. Meskipun rahasia bank itu diatur dalam perjanjian antara bank dengan nasabahnya akan tetapi rahasia bank tersebut juga sudah diatur dalam undang-undang.

Dalam hal ini upaya keamanan rahasia bank secara tidak langsung juga melindungi keamanan keuangan nasabah karena rahasia bank mencakup mengenai penyimpanan dan simpanan yang ada dalam bank. Upaya lain

⁸ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*.

yang dilakukan bank untuk menjaga keamanan rahasia bank yaitu yang pertama untuk kelaziman operasional dan pencatatan kepada bank. Kelaziman operasional tersebut merupakan pencatatan transaksi yang dilakukan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan akan data pokok yang harus dipatuhi. Dari pencatatan data tersebut diolah menjadi laporan yang bersifat informatif. Data dan informasi tersebut merupakan milik bank yang dikategorikan sebagai rahasia bank. Sebelum bank melakukan transaksi dengan nasabahnya, bank akan memeriksa identitas dari nasabah tersebut. Apabila nasabah tidak bertindak untuk diri sendiri maka bank dengan tegas wewenangnya untuk bertindak atas nama orang lain atau badan hukum untuk pihak lainnya. Biasanya pengecekan identitas tersebut juga dilakukan dengan pengecekan didalam referensi yang telah diajukan. Transaksi yang diajukan tersebut akan dikumpulkan kedalam dokumen yang akan disimpan di bank secara permanen. Sedangkan upaya yang kedua yaitu pencatatan pada bank merupakan pencatatan untuk menandai operasi bank atau transaksi yang dilakukan pihak bank yang harus dilakukan. Menandai tindakan yang dilakukan oleh bank untuk memenuhi berbagai kesanggupan terhadap permintaan terhadap informasi setiap kegiatan bank. Kegiatan pencatatan dan pengarsipan yang dilakukan bank merupakan tanggung jawab dan kewajiban pihak bank yang tidak dapat dihindari. Keuntungan nasabah dengan adanya teknologi sekarang ini nasabah lebih cepat untuk memperoleh layanan dengan nyaman. Keuntungan bagi bank adalah bank dapat menyimpan dokumen penting tanpa memerlukan banyak tempat.

Bank sebagai suatu lembaga yang mendapat kepercayaan dari masyarakat bahwa bank aman dan mampu merahasiakan keterangan atau informasi mengenai nasabah dan simpanannya yang ada dalam bank. Bank harus memiliki pedoman, organisasi, kebijakan dan prosedur kerja khususnya mengenai rahasia bank. Dalam Undang-Undang perbankan bank juga memiliki pengecualian yang berkaitan dengan kerahasiaan bank.

Pengecualian yang dijelaskan dalam undang-undang Nomor 10 Tahun

1998 Tentang Perbankan yaitu mengenai perpajakan, penyelesaian mengenai piutang bank yang telah diserahkan kepada badan urusan piutang dan lelang negara, untuk kepentingan peradilan dalam suatu perkara pidana, atas permintaan atau persetujuan terhadap nasabah berupa kuasa yang dibuat secara tertulis.

Menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeini hak nasabah untuk mengetahui keterangan yang ada dalam bank dapat diketahui apabila pihak tersebut merasa dirugikan oleh keterangan-keterangan yang diberikan bank sehubungan dengan pasal 41, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44 maka apabila ada pihak yang di rugikan berhak untuk mengetahui isi keterangan atau simpanan yang ada dalam bank.

Sesuai yang dijelaskan di atas tersebut tidak ada yang menyebutkan mengenai rahasia perbankan yang dapat dibuka atas kepentingan harta gono gini atau harta bersama. Harta gono gini atau harta bersama yang dijelaskan dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Pada dasarnya ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri terhadap harta gono gini akan dibagi sama rata kecuali adanya perjanjian tertentu antara suami dan istri tersebut sebelum perkawinan dilangsungkan. Sedangkan dalam pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan mengenai harta bawaan dari masing-masing pihak yaitu suami atau istri dan harta benda yang di dapatkan masing-masing hadiah atau warisan menjadi dibawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang pihak tersebut tidak mentukan lain.

Adapun hak mengenai harta bersama yang dijelaskan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu mengenai harta bersama para pihak yaitu suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, kemudian mengenai harta bawaan kedua belah pihak memiliki hak sepenuhnya terhadap benda yang di miliknya, dan apabila terjadi perpisahan dalam perkawinan maka diatur menurut hukum masing-masing.

Pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan suami atau istri untuk pengecekan deposito yang ada dalam bank harus menyesuaikan dengan aturan yang menjaga rahasia tersebut. Maka dalam hal ini pihak yang bertanggungjawab dalam membuka rahasia bank memiliki syarat-syarat sebagai pertimbangan untuk membuka rahasia bank tersebut:

1. Pengisian formulir untuk membuka rahasia bank

Bahwa pengisian formulir ini berisikan tentang identitas pihak yang ingin mengetahui rahasia bank tersebut sebagai bukti telah terjadi pembukaan rahasia bank.

2. Surat kuasa

Pihak bank mempertimbangkan surat kuasa sebagai alat untuk mengetahui simpanan uang yang diatas namakan oleh salah satu pihak yaitu suami atau istri. Surat kuasa tersebut dibuat dihadapan notaris dengan tanda tangan suami atau istri akan lebih kuat bila di bandingkan dengan keterangan yang berupa surat leterangan dari kelurahan.

Dalam hal ini prosedur pembukaan rahasia bank terkait pengecekan simpanan uang yang di lakukan oleh suami atau istri yang dinamakan oleh salah satu pihak. Ketentuan yang mengatur tentang membuka rahasia bak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang di tambah dari peraturan nomor 2/19/pbi/2000 tentang tata cara pemberian izin tertulis untuk membuka rahasia bank. Dasar hukum untuk membuka rahasia bank diatur dalam pasal 40 sampai pasal 45 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pasal 40 ayat (1) menjelaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabahnya dan penyimpanan dan simpanannya kecuali pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44 dan pasal 44A.

Dalam pembukaan rahasia bank tanpa persetujuan dari salah satu pihak bank tidak mengijinkan untuk melakukan pengecekan simpanan uang yang

ada dalam bank yang diatas namakan oleh salah satu pihak. Pembukaan rahasia bank dapat di lakukan apabila mendapat persetujuan dari salah satu pihak ada syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh bank dikarenakan tidak adanya aturan khusus untuk menjaga keamanan terhadap rahasia bank. Syarat tersebut untuk keamanan dan kenyamanan nasabah dalam membuka rahasia tanpa memberatkan nasabah penyimpan. Pihak bank juga memerlukan bukti yang sah untuk menjamin pembuka rahasia bank sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Pihak bank dapat memberikan keterangan mengenai simpanan uang yang ada dalam bank sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan untuk membuka rahasia bank semua diatur dalam pasal 40 sampai pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah diperjelas dalam peraturan nomor 2/19/pbi/2000 tentang tata cara pemberian izin tertulis membuka rahasia. Ketentuan membuka rahasia dapat dilakukan dengan memberikan perintah yang ditunjuk oleh nasabah. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam pasal 44 ayat (1) yaitu:

“atas permintaan dan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpanan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpanan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut”⁹

Bank tidak dapat megijinkan pengecekan simpanan uang yang ada dalam bank suami atau istri yang diatas namakan oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, adanya pengecualian yang harus dipatuhi mengenai syarat dan prosedur tertentu bila mana pihak-pihak yang ingin mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan. Pengecualian tersebut dijelaskan dalam pasal 40 ayat (1) Tahun 1998 Tentang Perbankan. Apabila ada pihak yang memaksa bank untuk memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun serta denda

⁹ Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang *perbankan*.

Rp. 200.000.000.000 dan pihak bank yang memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan diancam pidana 4 tahun serta denda paling banyak Rp. 8.000.000.000.¹⁰

Dalam hal ini apabila suami atau istri yang ingin mengecek simpanan uang yang ada dalam bank yang diatas namakan salah satu pihak yaitu suami atau istri. Pihak bank mewajibkan untuk membawa surat perintah atau surat izin tertulis yang menandai bahwa pihak suami atau istri menyetujui untuk pengecekan deposito meskipun dalam simpanan uang tersebut adalah harta bersama.

Putusan yang mendukung untuk membuka rahasia bank adalah putusan dengan nomor 64/PUU-X/2012 yang posisi kasusnya mengenai data nasabah dan simpanan untuk kepentingan pembagian harta gono gini dalam perkara perdata perceraian, pemohon bernama Magda Safrina,S.E.MBA. Pokok perkara penguji Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan terhadap UUD 1945. Dalam hal ini pemohon yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 10 tahun1998 tentang perbankan.yang isinya dalam pasal 40 ayat (1) yaitu bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 44A serta pasal 40 ayat (2) ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk pihak terafiliasi. Pemohon mengajukan gugatannya dengan alasan bahwa pemohon mengajukan gugatan perceraian dengan mencantumkan sejumlah harta bersama berupa tabungan dan deposito yang disimpan atas nama suami disejumlah bank kotamadya Banda Aceh dengan bukti tabungan dan bilyet deposito yang berada ditangan pemohon. Dalam persidangan suami pemohon sebagai tergugat tidak mengakui adanya tabungan dan deposito yang diajukan pemohon

¹⁰ Pasal 47 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang *Perbankan*.

dengan bantuan Mahkamah Syariah kota Banda Aceh surat permohonan yang diajukan oleh pemohon mengenai keberatan tabungan dan deposito suami pemohon dan jawaban dari pihak bank yang bersangkutan tidak dapat mengeluarkan data nasabah dan simpanannya. Pihak pemohon keberatan dengan adanya pasal 40 ayat (1) bahwa pemberian ruang bagi salah satu pihak suami atau istri yang tabungan atau simpanan uang yang diatasnamakan oleh salah satu pihak untuk menguasai dan mengalihkan sebagian atau seluruhnya harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tanpa diketahui oleh pihak lain, yang menyebabkan salah satu pihak dapat kehilangan sebagian atau seluruhnya haknya atas harta bersama tersebut. dalam pasal 40 ayat (1) tersebut telah memberikan ruang bagi terjadinya tindak pidana berupa penggelapan harta bersama oleh salah satu pihak yang berselisih diperadilan perdata perceraian dan harta bersama, maka pasal tersebut dapat merupakan sebuah bentuk pembiaran terhadap terjadinya tindak pidana penggelapan terhadap harta bersama secara meluas dimasyarakat.

Dalam perkara tersebut Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan tersebut untuk membuka kesempatan atas informasi mengenai data nasabah dalam perbankan mengenai harta bersama dalam perceraian. Meskipun dalam putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 bahwa MK mengatakan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang perbankan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.

Penulis sependapat dengan beberapa alasan yang di sebutkan di atas tersebut, karena menurut penulis apabila harta bersama diatas namakan oleh salah satu pihak suami atau istri dan pihak istri atau suami tidak dapat mengecek simpanan uang yang ada dalam bank maka simpanan tersebut dapat di kuasai dan di alihkan sebagian atau seluruhnya harta bersama

tersebut yang menyebabkan salah satu pihak tersebut dapat kehilangan haknya dan dapat merugikan dari salah satu pihak tersebut.

Menurut pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa suami atau istri memiliki hak sepenuhnya terhadap harta bersama. maka, apabila di lihat dari pasal tersebut ketentuan mengenai kerahasiaan bank khususnya tentang suami atau istri tidak dapat melakukan pengecekan simpanan uang yang bukan miliknya menjadi tidak adil. Karena seharusnya suami atau istri memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut.

Dalam pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berkewajiban untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabah penyimpanan dan simpanannya yaitu Anggota Dewan Komisaris Bank, Direksi Bank, Pegawai Bank dan Pihak Terafiliasi lainnya dari bank. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai pegawai bank merupakan pejabat dan karyawan yang ada dalam bank. Maka, kerahasiaan bank berlaku bagi siapa yang menjadi pegawai bank sekalipun bank tersebut tidak memiliki akses sama sekali terhadap atau tidak memiliki hubungan sama sekali dengan nasabah penyimpanan dan simpanannya yang ada dalam bank.¹¹

Maka, apabila dilihat dari pasal tersebut pegawai bank wajib merahasiakan semua keterangan yang berkaitan dengan nasabah jadi apabila seorang suami atau istri ingin melakukan pengecekan simpanan uang yang ada dalam bank tanpa persetujuan dari salah satu pihak maka pihak bank akan menolaknya untuk melakukan pengecekan.

Suami atau istri tidak di fikirkan ketika pasangan ini akan menikah. Mereka hanya berfikir menikah itu unuk selamanya. Artinya tidak terfikir sedikit pun oleh mereka bahwa suatu saat nanti akan terjadi perceraian itu mungkin saja terjadi. Pasangan tersebut baru berfikir masalah harta bersama pada saat proses perceraian. Penyelesaian masalah harta bersama

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Rahasia bank:berbagai masalah disekitarnya, dalam Hukum Perbankan*, (Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia), 2006, hlm. 36.

jarang sekali diselesaikan tuntas dan memuaskan karena banyak pasangan suami atau istri yang tidak membuat perjanjian kawin sebelum menikah. Padahal, perjanjian ini sangat penting sebagai pedoman jika suatu saat bercerai karena permasalahan rumah tangga mereka yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai. Perjanjian kawin merupakan wacana yang tabu dibicarakan oleh masyarakat umum apabila di praktikan. Artinya dalam pandangan masyarakat ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin dianggap sama saja untuk bercerai. Adanya perceraian membawa akibat hukum terputusnya ikatan suami atau istri di lain pihak mengakibatkan pada hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum harta kekayaan. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan harta kekayaan terjalin erat, sehingga keduanya memang dapat di bedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga.¹²

Sesuai yang di jelaskan di atas penulis melakukan penelitian suami atau istri melakukan pengecekan simpanan uang yang ada dalam bank terkait harta bersama yang di atasnamakan oleh salah satu pasangannya untuk mengantisipasi adanya konflik pada saat perceraian.

B. Hambatan-Hambatan Pengecekan Simpanan Uang Oleh Suami atau Istri Tanpa Persetujuan dari Salah Satu Pihak

Dalam hal ini apabila kita ingin mengecek suatu simpanan uang yang ada dalam bank tentunya kita harus memiliki tabungan yang ada dalam bank. Bank memiliki ketentuan atau cara membuat rekening tabungan ketentuan tersebut sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan identitas untuk membuat rekening tabungan misalnya kartu tanda penduduk(KTP)/Kartu Keluarga/Surat izin mengemudi/Kartu Tanda

¹² Suwatno, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa di Tarub Kabupaten Tegal*, (Tesis: Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 10.

Mahasiswa dan lain-lain

- 2) Menyiapan uang yang ingin di setor pertama kali. Untuk penyetoran minimal ada batas minimal yang ditentukan bank untuk penyetoran uang pertama.
- 3) Menandatangani buku tabungan yang telah disetujui tersebut.

Maka dalam hal ini bank memiliki aturan untuk pengecekan simpanan uang yang ada dalam bank. Bank sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib memeriksa atau meminta informasi yang memungkinkan untuk mengetahui profil dari nasabah. Identitas nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen yang mendukung. Bank dalam melakukan hubungan usaha dengan nasabahnya bank wajib melakukan pertemuan langsung dengan nasabahnya untuk melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas dari nasabah tersebut.

Cara pengecekan simpanan yang ada dalam bank terdapat empat cara yaitu:

1. Dengan menggunakan Via teller bank.

Caranya nasabah harus datang ke kantor cabang bank terdekat, nasabah harus menyerahkan buku tabungan keteller untuk dilakukan pengecekan saldo ataupun mutasi rekening apabila ada. Dengan datang ke kantor cabang bank nasabah di teller tersebut akan mendapatkan data simpanan yang ada dalam bank dengan detail. Dengan ketentuan buku tabungan tersebut milik

2. Dengan menggunakan via Automatic Teller Machine (ATM)

Nasabah dapat menggunakan fasilitas mesin ATM dengan menyiapkan ATM kemudian nasabah memasukkan kartu ATM ke Slotnya ketik PIN ATM kemudian pilih informasi saldo.

3. Via SMS banking

Nasabah dapat mengecek simpanan yang ada dalam bank dengan mengirim SMS dari ponsel. Namun sebelumnya nasabah harus mendaftar dahulu nomor handphone dikantor cabang bank atau melalui ATM.

4. Via internet Banking

Cara pengecekan simpanan yang ada dibank tersebut dapat dilakukan

dengan sarana internet di komputer. Caranya yaitu mengakses IB bank dengan cacatan mengetahui alamat id bank <http://ib.bri.co.id/ib-bri/login.html>.

Pengecekan simpanan nasabah bank menurut Erin salah seorang pegawai Bank Negara Indonesia (BNI) tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, jadi hanya orang yang namanya tertera di dalam buku tabungan itu sendiri yang dapat mengecek simpanan yang ada di bank. Hal ini sejalan dengan prinsip kerahasiaan bank yang dianut oleh Hukum Perbankan Indonesia, yaitu tepatnya pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang pada dasarnya menyatakan bahwa bank berkewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal itu tidak berlaku untuk beberapa keadaan tertentu misalnya untuk kepentingan perpajakan seperti yang disebutkan di dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Dengan ketentuan rahasia bank tersebut dapat mengamankan data identitas ataupun simpanan yang ada dalam bank. Akan tetapi dilain pihak ketentuan ini juga menjadi hambatan pihak suami atau istri yang ingin mengecek simpanan uang pasangannya.

Selain ketentuan mengenai rahasia bank tersebut, yang menjadi hambatan lainnya untuk pengecekan simpanan uang suami atau istri yang ada di bank adalah adanya ketentuan mengenai surat kuasa yang terdapat dalam pasal 44 ayat (1) undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yaitu bahwa atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpanan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpanan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpanan tersebut. Dalam ketentuan tersebut maka suami atau istri tidak dapat melakukan pengecekan simpanan uang milik pasangannya apabila tidak ada kuasa dari pasangannya tersebut, padahal menurut pasal 35 ayat (1) undang-undang No.1 tahun 1974 yang memuat kategori bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama yang dimaksud adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, karena

pekerjaan suami atau istri. Ini berarti harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus baik karena kematian atau perceraian. Dalam pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta tersebut, hal ini berarti untuk uang suami atau istri yang ada di bank yang uangnya diperoleh selama perkawinan maka pasangannya juga berhak untuk mengetahuinya termasuk mengetahui kegiatan transaksi dari simpanan uang tersebut tanpa perlu adanya kuasa dari suami atau istri yang namanya tertera di dalam buku tabungan. Akan tetapi dalam hukum perbankan mengharuskan adanya surat kuasa terlebih dahulu apabila pasangan dari suami atau istri ingin melakukan pengecekan simpanan uang yang ada di bank. Berdasarkan teori kerahasiaan bank yang menyatakan bahwa teori rahasia bank terbagi menjadi dua yang bersifat mutlak yaitu menurut teori ini bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau luar biasa. Teori ini mengutamakan kepentingan individu sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan. Sedangkan menurut teori rahasia bank yang bersifat relatif bank diperbolehkan membuka rahasia bank atau memberi keterangan mengenai nasabahnya apabila adanya kepentingan yang mendesak misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Teori ini banyak dianut oleh bank-bank di dunia termasuk Indonesia. Adanya pengecualian dalam ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta keterangan atau data tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila merujuk pada teori kerahasiaan bank relatif yang dianut oleh Indonesia, maka seharusnya pihak suami atau istri yang pasangannya memiliki simpanan uang di bank dapat diperbolehkan untuk melakukan pengecekan simpanan uang pasangannya di bank, karena di dalam Undang-Undang Perkawinan tepatnya pada pasal 36 ayat (2) memberikan hak

sepenuhnya kepada suami atau istri atas harta bersama yang mereka miliki, sehingga hambatan yang ada untuk melakukan pengecekan simpanan uang pasangan di bank yaitu ketentuan diwajibkannya adanya surat kuasa menjadi kurang sesuai dengan teori kerahasiaan bank relatif

Dari beberapa pendapat dari pegawai bank diatas, mereka mengatakan bahwa surat kuasa merupakan suatu hambatan yang membuat pihak suami atau istri yang pasangannya memiliki simpanan uang di bank menjadi tidak dapat melakukan pengecekan simpanan uang pasangannya, walaupun uang yang disimpan tersebut merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan atau harta bersama yang dimiliki pasangan suami istri.

Pendapat dari beberapa pegawai bank tersebut apabila disesuaikan dengan teori kerahasiaan bank, maka telah sesuai dengan teori tersebut yang menjamin kerahasiaan data dari nasabahnya. Kerahasiaan nasabah tidak hanya berupa data-data pribadi seperti nama dan alamat atau lainnya, tetapi juga termasuk jumlah simpanan yang dimiliki oleh nasabah serta transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Jadi, dengan adanya surat kuasa yang dijadikan syarat untuk melakukan pengecekan uang yang dilakukan oleh pasangan suami atau istrinya, hal ini untuk memenuhi prinsip dari kerahasiaan bank itu sendiri.

Simpulan

1. Setelah dilakukan penelitian mengapa suami istri tidak dapat melakukan pengecekan simpanan uang yang ada di bank terkait harta bersama yang diatas namakan oleh salah satu pihak karena adanya rahasia bank yang sangat penting karena bank merupakan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan simpanannya. Maka, bank merupakan pihak yang entity dan terafiliasi termasuk pegawai bank maupun manajemen bank yang mengetahui aturan mengenai kerahasiaan bank. Hal tersebut karena untuk menghindari sanksi pidana maupun sanksi administratif dalam melakukan penerapan dalam suatu hal yang berkaitan dengan informasi mengenai rahasia bank sangatlah sulit karena belum ada suatu keseragaman yang

menentukan mengenai informasi yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang dirahasiakan oleh bank mengenai informasi atau data seorang nasabah. Pentingnya suami atau istri dapat melakukan pengecekan simpanan uang yang ada dalam bank apabila suami atau istri menjelang adanya persoalan atau adanya konflik antara pasangan tersebut. Maka dalam hal ini bank dapat memberikan pengecualian terhadap pasangan yang ingin melakukan pengecekan simpanan uang yang ada dalam bank.

2. Hambatan pengecekan simpanan uang yang ada dibank tanpa mendapatkan persetujuan dari suami atau istri yaitu adanya peraturan mengenai kerahasiaan bank dan bank tidak akan memberikan izin mengenai pengecekan simpanan uang yang ada didalam bank, kecuali mendapatkan surat kuasa dari suami atau istri yang nama nya tertera dalam buku tabungan.

Daftar Pustaka

Buku

Peter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana, 2014.

Soejono, Soekanto, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Sutan, Remy Sjahdeini. *Rahasia bank: berbagai masalah disekitarnya, dalam Hukum Perbankan*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006.

Suwatno. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa di Tarub Kabupaten Tegal*. Tesis: Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *tentang Perbankan*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*.

Naskah Internet

Magfirah, Rizka. "Arti Bank". <https://id.wikipedia.org/wiki/perbankan>.

Diakses 6 Juli 2016.

Sandi. "Kewajiban Bank".

<http://one-widhi.blogspot.co.id/2012/03/kewajiban-bank-dan-nasbah.html>.

Diakses 6 Juli 2016.